

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2010). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 telah disahkan peraturan baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Pewujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban (Usman, 2014). Penerapan basis akrual telah dilakukan di berbagai negara yang sudah terlebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Setidaknya ada lima negara yang menjadi pelopor dalam penerapan basis akrual pada sektor publik yaitu Selandia Baru, Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Swedia (Neelissen,2004).

Hal ini dilakukan karena penggunaan basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai biaya-biaya yang digunakan oleh pemerintah. Informasi ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih baik. Penerapan kebijakan baru tak pernah lepas dari permasalahan dan hambatan. Di Portugal, setelah 15 tahun penerapan basis akrual pada sektor publik ternyata masih terdapat banyak masalah yang mengakibatkan keberagaman dalam penerapannya. Jika tidak segera diselesaikan permasalahan ini bisa menyebabkan kemunduran dalam upaya mencapai penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Hal senada juga terjadi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di New Zealand. Perjalanan menuju kesuksesan yang dicapai New Zealand

tidaklah mudah. Laporan Keuangan pertama yang dihasilkan dengan menggunakan basis akrual dinilai belum memenuhi standar jika disandingkan dengan laporan keuangan sektor swasta. Selain itu penyajian nilai kekayaan bersih yang disajikan negatif pada laporan keuangan menimbulkan kekawatiran akan reaksi masyarakat. Namun lewat komitmen yang ditunjukkan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam penerapan kebijakan baru tersebut, New Zealand akhirnya sukses menjadi negara yang menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Keputusan untuk menerapkan SAP berbasis akrual seperti yang telah dilakukan oleh negara lain yang sudah menerapkannya terlebih dahulu dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan karena kondisi di tiap-tiap negara sangat berbeda sehingga pendekatan yang harus digunakan juga perlu disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap negara tersebut. Diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan dan menerapkan SAP yang baru agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Dibandingkan dengan negara maju seperti New Zealand, negara berkembang lebih rentan terhadap permasalahan dalam penerapan kebijakan ini. Ada beberapa alasan yang membuat negara berkembang lebih beresiko dibanding dengan negara maju (Reid, 2003) yaitu:

1. Negara berkembang tidak memiliki cukup pegawai dengan kemampuan akuntansi yang baik.
2. Korupsi dan kepentingan pribadi/kelompok di negara berkembang dapat merusak upaya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

3. Negara berkembang tidak memiliki keleluasaan seperti negara maju dalam hal sumber daya. Karena keterbatasannya, kesalahan dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki dapat berakibat lebih parah dibandingkan dengan negara maju.
4. Kejenuhan dalam reformasi sistem negara dapat menjadi hambatan dalam proses penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
5. Infrastruktur komunikasi dan teknologi yang terbatas dapat membatasi pilihan-pilihan dalam penerapan kebijakan.
6. Ada kemungkinan konflik terjadi antara tujuan yang ingin dicapai negara berkembang dengan para pemberi bantuan.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Sedangkan Aldiani (2010), berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya komputer dan *software* akan membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kabupaten Bangka harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Permasalahan dalam penerapan kebijakan dapat menimbulkan akibat yang serius dalam jangka panjang. Jika kebijakan ini tidak berhasil dipahami dengan baik oleh para

penyelenggara pemerintahan maka hal ini dapat mengakibatkan mereka kembali menggunakan sistem lama yang akan menghalangi tercapainya tujuan dari penerapan sistem yang baru (Simon, 2009).

Meskipun pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menjembatani peralihan antara basis kas dengan akrual lewat penerapan basis kas menuju akrual, namun hal ini tidak serta merta memberikan kepastian bahwa penerapan akrual di pemerintahan Indonesia akan terbebas dari permasalahan dan hambatan. Masalah dan hambatan ini yang nantinya akan menciptakan celah antara tujuan yang diharapkan tercapai dan tujuan yang benar-benar dicapai. Langkah awal yang diperlukan untuk memastikan tercapainya penerapan kebijakan ini adalah dengan memahami sampai dimanakah kebijakan ini telah dilaksanakan. Dengan mengetahui sejauh mana kebijakan telah diterapkan, maka perbaikan akan dapat dirancang dan dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka merupakan suatu instansi pemerintah yang mengurus keuangan di Kabupaten Bangka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dapat dikatakan berhasil jika laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah dapat dikatakan baik atau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Disini penulis mencoba untuk mengevaluasi bagaimana penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah diterapkan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan seluruh Penyelenggara Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan SAP akrual dalam menyusun Laporan Keuangannya. Walaupun baru diwajibkan penerapannya pada tahun 2016, namun ada juga beberapa pemerintah daerah yang telah terlebih dahulu menerapkan SAP akrual pada tahun sebelumnya. Hal ini sangat menarik perhatian peneliti untuk melihat apakah selama 2 tahun penerapan SAP akrual ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah dengan judul **“Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
2. Bagaimana kesiapan para staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
3. Adakah perbaikan dalam penyajian Laporan Keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah menerapkan SAP akruaI selama periode tahun 2016-2017 ?

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah BPKAD Kabupaten Bangka pada tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan SAP berbasis akruaI pada BPKAD Kabupaten Bangka

2. Untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan para staff BPKAD Kabupaten Bangka dalam menerapkan SAP berbasis akrual.
3. Untuk mengidentifikasi apakah ada perbaikan dan perubahan kebijakan dalam penyajian laporan keuangan setelah menerapkan SAP akrual selama periode tahun 2016-2017.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademisi dalam rangka mengkaji dan mengembangkannya. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta bisa memperdalam ilmu pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

2. Kontribusi Praktis

Penulis sangat berharap dapat memberikan masukan yang berarti bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka terutama berkaitan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berdasarkan pada teori-teori yang berlaku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alternatif penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan serta kontribusi penelitian kemudian terakhir dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang relevan untuk mendukung dalam penelitian dan menjelaskan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual setelah itu diuraikan dan digambarkan kedalam kerangka pemikiran.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, metode perancangan sistem terstruktur yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang profil dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka dan menjelaskan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, keterbatasan penelitian serta pemberian saran-saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya ke arah yang lebih berguna atau lebih baik.

